

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Produktivitas tenaga kerja bertujuan dalam peningkatan kesejahteraan serta perbaikan pada taraf hidup masyarakat. Produktivitas tenaga kerja tidak hanya meningkatkan pendapatan namun diharapkan mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Usaha tersebut diperuntukkan kepada semua penduduk tanpa memisahkan gender, etnis, agama, dan suku. Kenyataannya dalam implementasi usaha tersebut masih terdapat pengabaian pada permasalahan keadilan dan kesetaraan gender di mana masih terdapat ketimpangan pada peran gender. Adam Smith dalam bukunya yang berjudul “*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*” mengatakan upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja ditekankan pada spesialisasi dari setiap individu yang merupakan pelaku ekonomi (Hasan & Azis, 2018).

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan spesialisasi untuk menunjang produktivitas tenaga kerja dirasa masih terhambat dikarenakan masih terdapat permasalahan pada keadilan gender dimana perempuan dalam menjalankan produktivitas sebagai tenaga kerja kerap kali mendapatkan kondisi yang cukup menantang. Baik terlibat dalam pekerjaan berupah maupun menjalankan usaha, perempuan kerap mendapatkan permasalahan seperti diskriminasi, hambatan terkait pembagian kerja, diskriminasi upah, pekerjaan yang kurang layak, kebebasan berekspresi dalam pengambilan keputusan, akses ke informasi serta teknologi, dan akses ke lembaga penegak hukum. Pandangan yang merendahkan perempuan ini dapat melanggengkan ketidakadilan gender dan praktik diskriminasi dalam bentuk pembatasan atau penghapusan hak-hak dasar perempuan sebagai warga negara (Dini et al., 2020).

Fakta bahwa ketimpangan gender masih menjadi permasalahan dunia, hal tersebut menjadi salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terdapat pada butir lima yang bertujuan dalam terciptanya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan semua anak perempuan. Provinsi Jawa Barat merupakan wujud dari salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki masalah

ketimpangan gender. Ketimpangan gender tersebut dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang digunakan dalam menakar capaian pembangunan gender dengan melihat apabila indeks mendekati angka 100 maka capaian pembangunan gender dapat dikatakan sudah setara seperti yang terlihat sebagai berikut:

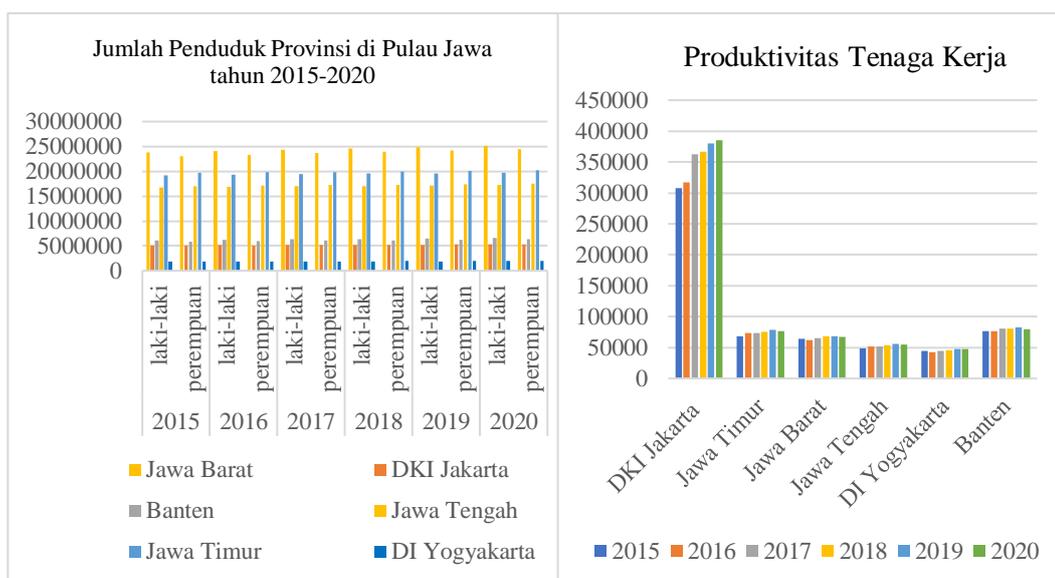
**Tabel 1. IPG menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015-2020**

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DKI Jakarta	94.72	94.98	94.7	94.7	94.71	94.63
Jawa Barat	89.11	89.56	89.18	89.19	89.26	89.2
Jawa Tengah	92.21	92.22	91.94	91.95	91.89	92.18
D I Yogyakarta	94,41	94.27	94.39	94.73	94.77	94.8
Jawa Timur	91,07	90.72	90.76	90.77	90.91	91.07
Banten	91,11	90.97	89.27	89.27	91.67	91.74

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Dibandingkan dengan lima provinsi lainnya di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat memiliki ketimpangan pembangunan gender yang tertinggi yang dapat terlihat dari perolehan IPG Jawa Barat yang masih jauh dari angka 100. Perolehan tersebut mengartikan bahwa terdapat gap yang cukup besar pada capaian pembangunan penduduk perempuan yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian pembangunan pada penduduk laki-laki di Provinsi Jawa Barat.

**Grafik 1. Jumlah Penduduk Provinsi di Pulau Jawa (Ribuan Jiwa) dan Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah) Tahun 2015-2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Anisa Novita Sari, 2022

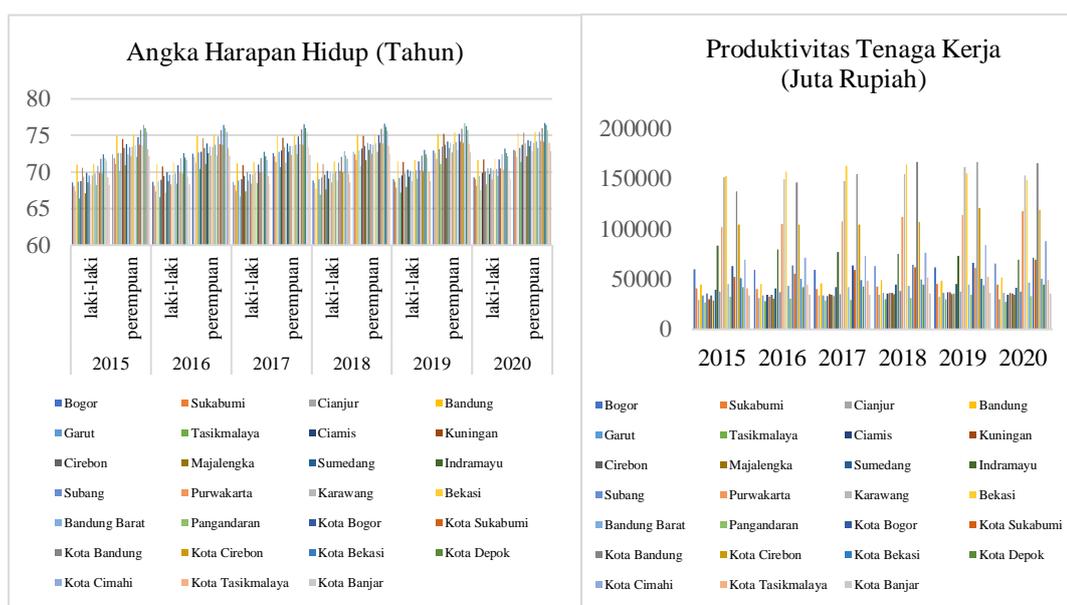
**ANALISIS PENGARUH KETIMPANGAN GENDER TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA BARAT**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Pembangunan  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Jumlah penduduk provinsi di Pulau Jawa terlihat mengalami *trend* kenaikan di setiap tahunnya. Terlebih pada Provinsi Jawa Barat yang menduduki peringkat pertama baik penduduk laki-laki maupun perempuan. Adam Smith (1776) mengatakan bahwa jumlah penduduk dan stok kapital merupakan penentu besar atau kecilnya output penduduk dari tahun ke tahun (Chalid, 2015). Berbanding dengan teori yang dikatakan, peraih produktivitas tenaga kerja tertinggi tahun 2015-2020 adalah Provinsi DKI Jakarta, peraih tertinggi selanjutnya adalah Provinsi Banten, dan Jawa Timur yang jumlah penduduknya lebih rendah dibandingkan Jawa Barat. Sementara Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan teori yang dikatakan Adam Smith. Sehingga hal tersebut dapat mengindikasikan rendahnya produktivitas tenaga kerja yang dihasilkan oleh Provinsi Jawa Barat salah satu faktornya diindasikan oleh masih terjadinya permasalahan ketimpangan gender.

Umur panjang dan hidup yang sehat merupakan salah satu syarat yang penting bagi tenaga kerja dalam berproduktivitas. Untuk melihat besaran Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan cerminan dari taraf tingkat kesehatan dapat dilihat sebagai berikut:

**Grafik 2. Angka Harapan Hidup (AHH) Berdasarkan Jenis Kelamin Kota/Kab Jawa Barat (Tahun) dan Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah) Tahun 2015-2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2021

Anisa Novita Sari, 2022

**ANALISIS PENGARUH KETIMPANGAN GENDER TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA BARAT**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Pembangunan  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Jika dibandingkan berdasarkan gender secara keseluruhan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, AHH penduduk perempuan dalam 6 tahun terakhir selalu lebih tinggi rata-rata sekitar 4 tahun dibandingkan dengan AHH penduduk laki-laki. Faktor AHH penduduk perempuan lebih tinggi dikarenakan perempuan dikaruniai sepasang kromosom x yang membuat metabolisme tubuh perempuan lebih kuat dan tuntutan budaya perempuan untuk selalu cantik dan bersih membuat perempuan memiliki gaya hidup yang lebih baik (Dini et al., 2020). Tingginya AHH pada penduduk perempuan menandakan bahwa tingkat taraf kesehatan yang dimiliki oleh perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Schultz (1960) taraf tingkat kesehatan yang tinggi akan meningkatkan produktivitas. Teori tersebut nyatanya tidak selalu berlaku, seperti halnya pada fenomena yang terjadi pada delapan Kabupaten (Bogor, Sukabumi, Ciamis, Indramayu, Subang, Karawang, Bandung Barat, dan Pangandaran) serta dua Kota (Bekasi dan Banjar) pada tahun 2016. Pada tahun tersebut AHH dari sepuluh Kabupaten/Kota penduduk perempuan yang tinggi, justru terdapat penurunan pada produktivitas tenaga kerja.

Faktor tersebut terjadi disebabkan tingginya taraf kesehatan pada penduduk perempuan nyatanya tidak dapat sepenuhnya mencerminkan kepedulian dan perhatian sosial budaya pada perempuan. Hal tersebut disebabkan kualitas hidup perempuan tergantung pada perlakuan dari kebijakan, sosial, dan budaya terhadap perempuan (Gaib Hakiki et al., 2019). Seperti halnya, fakta bahwa perempuan memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi belum dapat meredam pandangan akan tenaga kerja perempuan yang dinilai lemah bila dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Akibat pandangan yang diskriminatif, tenaga kerja perempuan dibatasi oleh jenis-jenis pekerjaan tertentu yang tidak seelusage bila dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki (Dini et al., 2020).

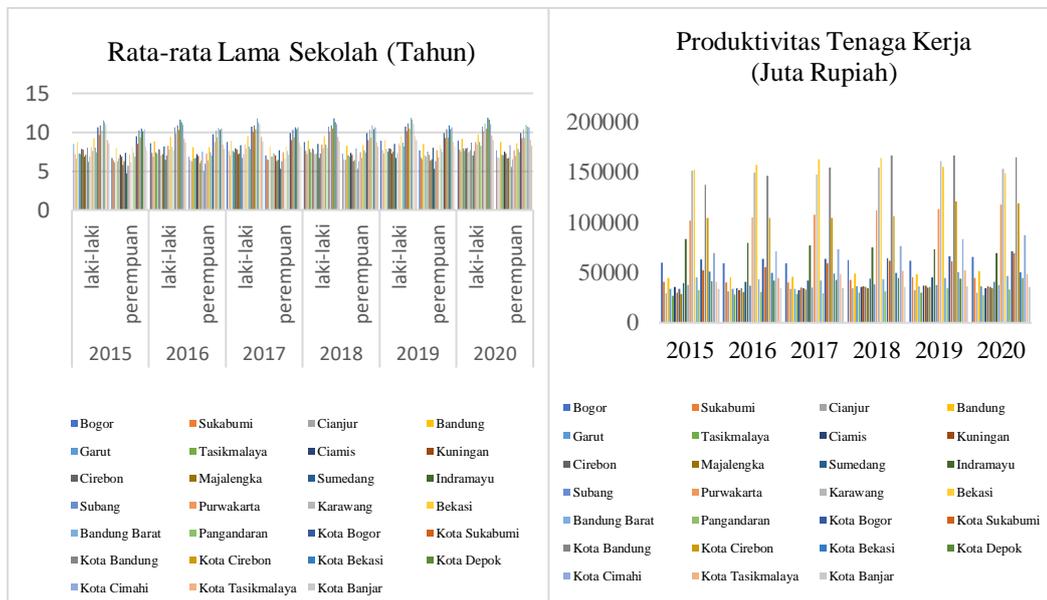
Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula produktivitas tenaga kerja (Bado, dkk 2017). Tingkat pendidikan yang diukur dari lama waktu menempuh pendidikan formal merupakan salah satu upaya bagi sumber daya manusia dalam menunjang produktivitas tenaga kerja, untuk melihat lama waktu menempuh pendidikan formal yang diukur menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang dapat dilihat sebagai berikut:

Anisa Novita Sari, 2022

**ANALISIS PENGARUH KETIMPANGAN GENDER TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA BARAT**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Pembangunan  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

**Grafik 3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Berdasarkan Jenis Kelamin Kota/Kab Jawa Barat (Tahun) dan Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah) Tahun 2015-2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2021

Penduduk laki-laki pada data Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) selalu menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Hal ini disebabkan oleh masih melekatnya budaya di masyarakat yang memandang anak perempuan tidak wajib untuk sekolah tinggi dan bahkan dikarenakan kondisi sosial ekonomi keluarga yang rendah anak perempuan terpaksa untuk menikah pada usia sekolah. Meskipun lebih rendah, kenaikan pada RLS penduduk perempuan terlihat meningkat disetiap tahunnya. Kenaikan RLS pada perempuan kerap dijumpai lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan RLS penduduk laki-laki, seperti halnya pada tahun 2020. Periode tahun yang sama dengan kenaikan pada RLS penduduk perempuan, penurunan produktivitas pada tenaga kerja terjadi pada sebelas Kabupaten (Sukabumi, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Karawang, Bekasi, Cianjur, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, dan Pangandaran) Serta lima Kota (Cirebon, Bekasi, Bandung, Tasikmalaya, dan Banjar). Hal tersebut berlawanan dengan teori yang dikemukakan Schultz (1961) bahwa sumber daya manusia yang menempuh pendidikan formal dapat menciptakan produktivitas yang tinggi (Hasan & Azis, 2018).

Faktor penyebab dari permasalahan tersebut disebabkan peningkatan pada RLS penduduk perempuan pada Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat disetiap

Anisa Novita Sari, 2022

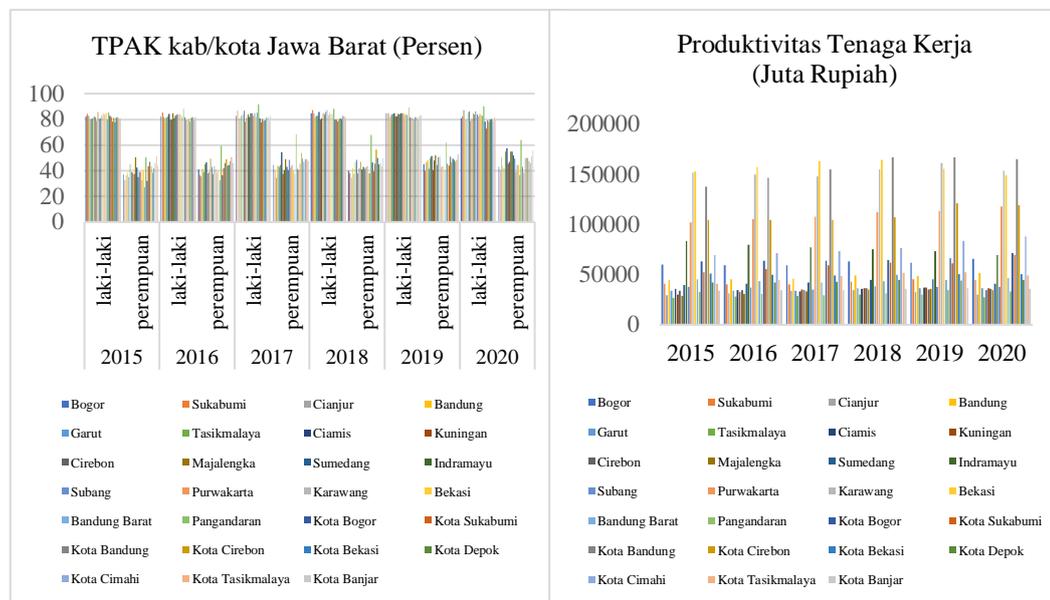
**ANALISIS PENGARUH KETIMPANGAN GENDER TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA BARAT**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Pembangunan  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

tahunnya nyatanya juga diiringi dengan fakta masih tingginya kasus pernikahan pada anak perempuan usia sekolah. Hal tersebut menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai tiga provinsi tertinggi di Indonesia dengan pernikahan anak perempuan di usia sekolah (Badan Pusat Statistik et al.,2020).

Upaya merealisasikan produktivitas tenaga kerja tidak luput dari peran dari tenaga kerja yang memiliki peran penting. Pentingnya tenaga kerja bagi produktivitas tenaga kerja dikarenakan merupakan salah satu faktor produksi bagi produktivitas. Untuk melihat Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK) pada Kabupaten/Kota dapat terlihat pada grafik berikut:

**Grafik 4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Jenis Kelamin Kota/Kab Jawa Barat (Persen) dan Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah) Tahun 2015-2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2021

Rendahnya TPAK pada penduduk perempuan dibandingkan dengan TPAK penduduk laki-laki memang nampak terlihat. Jika dibandingkan dengan peningkatan TPAK, peningkatan pada TPAK penduduk perempuan cenderung lebih besar dibandingkan laki-laki. Hal tersebut tercermin pada TPAK penduduk perempuan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2019 yang mengalami peningkatan, namun pada tahun yang sama masih terjadi penurunan pada produktivitas tenaga kerja di beberapa kabupaten diantaranya empat Kabupaten (Bogor, Cianjur, Indramayu, dan Bekasi) serta pada tiga Kota (Sukabumi, Bandung,

Anisa Novita Sari, 2022

ANALISIS PENGARUH KETIMPANGAN GENDER TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA BARAT

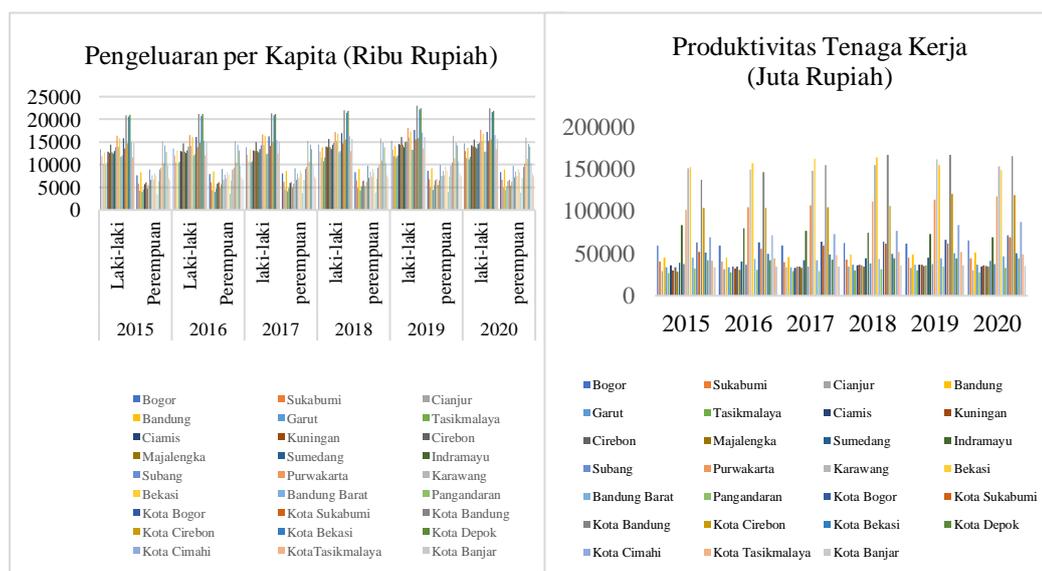
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Pembangunan  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dan Depok). Hal tersebut berlawanan dengan teori Schultz (1961) dimana tingginya produktivitas dipengaruhi oleh kuantitas dari tenaga kerja (Bado et al., 2017).

Hal tersebut disebabkan oleh kurang maksimalnya output yang dihasilkan oleh tenaga kerja perempuan dikarenakan masih banyaknya tenaga kerja perempuan yang hanya bekerja dibawah kerja jam normal (35 jam/minggu) yang juga terlihat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 480891 penduduk (BPS Jawa Barat, 2019). Keadaan ini disebabkan partisipasi angkatan kerja perempuan masih dihadapkan dalam situasi membingungkan serta tuntutan budaya yang masih menempatkan perempuan untuk dapat membagi waktu melakukan produktivitas di luar dan perannya di rumah. Dilema tersebut mempengaruhi pilihan pekerjaan perempuan yang tidak bisa seleluasa tenaga kerja laki-laki (Dini et al., 2020).

Upaya dalam mencapai produktivitas tenaga kerja selanjutnya menurut teori yang disampaikan oleh Nurkse dapat tercapai apabila diiringi dengan daya beli dari penduduk yang tinggi. Pengukuran daya beli di Indonesia diukur menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, hal ini ditekankan ketersediaan data PNB per kapita yang tidak tersedia hingga taraf Kabupaten/Kota (Dini et al., 2020). Untuk melihat pengeluaran per kapita berdasarkan Kabupaten/Kota dapat terlihat pada grafik berikut:

**Grafik 5. Pengeluaran per Kapita Berdasarkan Jenis Kelamin Kota/Kab Jawa Barat (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) dan Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah) Tahun 2015-2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2021

Anisa Novita Sari, 2022

**ANALISIS PENGARUH KETIMPANGAN GENDER TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA BARAT**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Pembangunan  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Jika dilihat berdasarkan grafik 5 terlihat dimana penduduk perempuan selalu memiliki pengeluaran per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Meskipun demikian, terdapat kondisi dimana penduduk perempuan memiliki kenaikan pengeluaran per kapita yang lebih unggul dibandingkan penduduk laki-laki. Unggulnya pengeluaran per kapita sebagai wujud dari kondisi peningkatan pada daya beli penduduk perempuan nyatanya tidak meningkatkan produktivitas tenaga kerja seperti yang dapat dilihat pada tahun 2017 pada tiga Kabupaten (Sukabumi, Subang, dan Karawang). Keadaan ini bertentangan dengan teori yang disampaikan oleh Nurske bahwa daya beli dari penduduk yang tinggi menyebabkan produktivitas menjadi tinggi (Hasan & Azis, 2018).

Hal ini dikarenakan pendapatan masyarakat menjadi komponen utama yang mempengaruhi pengeluaran per kapita serta keduanya memiliki hubungan yang bersifat positif, jika pendapatan meningkat maka tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat pun turut meningkat (Hanum & Sarlia, 2019). Faktanya, kebijakan yang berlaku masih memiliki makna yang diskriminatif bagi perempuan. Seperti pada undang-undang perihal sistem upah pada tenaga kerja perempuan. Tunjangan kesehatan serta pada tunjangan keluarga tenaga kerja perempuan dianggap belum menikah, sehingga suami serta anak-anak tidak memperoleh tunjangan seperti halnya yang didapatkan oleh pekerja laki-laki (KPPPA & BPS, 2014).

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya yang membahas mengenai pengaruh dari AHH, RLS, TPAK, dan pengeluaran per kapita terhadap produktivitas tenaga kerja seperti penelitian dari Oktavia dkk (2017), Rahman & Erni (2020), Koyuncu., *et al* (2015), Arham & Stella (2020) yang menyatakan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan berpengaruh terhadap variabel dependen, yakni produktivitas tenaga kerja.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan data yang didapat dari BPS Jawa Barat dapat disimpulkan bahwa IPG di Provinsi Jawa Barat selama enam tahun terakhir memiliki angka yang paling rendah diantara provinsi di Pulau Jawa lainnya. Sehingga dalam pemaksimalan output produktivitas tenaga kerja di Provinsi Jawa barat masih menjadi posisi ke empat dibandingkan dengan dengan wilayah lain yang memiliki sumber daya manusia lebih sedikit dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Sehingga

penelitian ini ingin melihat variabel-variabel yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja yakni, rasio gender pada AHH, rasio gender pada RLS, rasio gender pada TPAK, dan rasio gender pada pengeluaran per kapita. Atas uraian tersebut peneliti memilih judul penelitian ini dengan judul “**Analisis pengaruh Ketimpangan Gender terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat**”. Berdasarkan Latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh rasio gender pada angka harapan hidup terhadap produktivitas tenaga kerja kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh rasio gender pada rata-rata lama sekolah terhadap produktivitas tenaga kerja kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh rasio gender pada tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap produktivitas tenaga kerja kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana pengaruh rasio gender pada pengeluaran per kapita terhadap produktivitas tenaga kerja kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan perumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio gender pada angka harapan hidup terhadap produktivitas tenaga kerja kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat
- b. Mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio gender pada rata-rata lama sekolah terhadap produktivitas tenaga kerja kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat
- c. Mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio gender pada tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap produktivitas tenaga kerja kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat
- d. Mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio gender pada pengeluaran per kapita terhadap produktivitas tenaga kerja kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif baik secara praktis maupun teoritis seperti sebagai berikut:

a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi ilmiah mengenai pengaruh ketimpangan gender pada angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan pengeluaran per kapita terhadap produktivitas tenaga kerja. Sehingga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Aspek Praktis

1) Bagi masyarakat

Sebagai wawasan dan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja yakni ketimpangan gender pada angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan pengeluaran per kapita. Sehingga hal tersebut diharapkan menjadi refleksi bagi masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender.

2) Bagi pemerintah

Sebagai faktor penting untuk dipertimbangkan oleh para praktisi ketika menentukan kebijakan yang tepat, khususnya di Indonesia terkait dengan ketimpangan gender di Provinsi Jawa Barat.